



DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**



www.indagkopkaltimprov.go.id



Indagkopkaltim



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Surarmi
19690312 198903 2 009



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah selesai disusun. Rencana Kerja ini disusun untuk mengikuti tata tertib Administrasinya.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pilihan Perindustrian, Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Wajib Koperasi agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah cepat dan dinamis seperti halnya dengan kondisi saat ini, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Oleh karena itu, Dinas Perindagkop & UKM telah berupaya untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang akan dicapai dan yang menjadi kendala/permasalahan dalam suatu organisasi, dengan kata lain Rencana Kerja Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaiannya dan lebih difokuskan pada peranan yang dapat diberikan dalam rangka mensinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat Tahun 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Dalam proses penyusunan ini selalu mengupayakan yang terbaik, kami terus mengharapkan saran-saran untuk perbaikan ke depannya dan kami mohon maaf atas hal-hal yang luput dari perhatian kami.

Kepala Dinas,



Heni Purwaningsih, S. Si, M. Si

NIP. 19730314 199803 2 009

DAFTAR ISI

BAB I	- 2 -
PENDAHULUAN.....	- 1 -
1.1. Latar Belakang.....	- 1 -
1.2. Landasan Hukum.....	- 2 -
1.3. Maksud dan Tujuan	- 5 -
1.4. Sistematika Penulisan.....	- 6 -
BAB II.....	- 1 -
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023.	- 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	- 1 -
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- 35 -
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	- 39 -
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	- 41 -
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	- 92 -
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	- 110 -
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	- 110 -
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	- 117 -
3.3. Program dan Kegiatan.....	- 122 -
BAB IV	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	- 134 -
BAB V.....	- 173 -
PENUTUP	- 173 -
5.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja.....	- 174 -
5.2 Rencana tindak lanjut.	- 173 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sehingga Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisi program dan kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terakhir Perubahan dengan peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;
19. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran 4 Pasal 1 Butir 10);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; kemudian

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
29. Surat Edaran Gubernur Nomor: 000.7.2.4/6353/Bapp-II tanggal 13 April 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Menjadi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM pada level nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.

- c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2025 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
- d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Triwulan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

5.1. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja

5.2. Rencana Tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan sebanyak 18 (Delapan Belas) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Murni

sejumlah Rp. 94.625.377.240 (Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), pada anggaran Perubahan sebesar Rp 100.474.952.187,- (Seratus Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 91.387.079.849 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 90,96 %.

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan Indikator Persentase tercapainya target UKM naik kelas dengan target 3% tercapai sebesar 2,5%
- 2) Program Pengembangan UMKM
Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan Indikator Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital dengan target 10% tercapai sebesar 3%
- 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan Indikator Persentase tercapainya target Koperasi sehat dengan target 10% tercapai sebesar 9,3%

- 4) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan dengan Indikator Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA dengan target 260 Eksportir tercapai sebesar 228 Eksportir
- 5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan dengan Indikator Persentase stabilitas harga bapokting dengan target 80% tercapai sebesar 71,79%
- 6) Program Pengembangan Ekspor
Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan dengan Indikator Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non Batubara dengan target 5% tercapai sebesar -25,09%
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Mendukung tugas dan fungsi secretariat dengan Indikator Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan target 90% tercapai sebesar 89,21%
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Mendukung tugas dan fungsi UPTD BPSMB dengan Indikator Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan target 90% tercapai sebesar 87,18%
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Mendukung tugas dan fungsi UPTD Pelatihan Koperasi dengan Indikator Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan target 90% tercapai sebesar 80%.

10) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Mendukung tugas dan fungsi UPTD Pelatihan Koperasi dengan Indikator Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK) dengan target 300 Koperasi dan UKM tercapai sebesar 240 Koperasi dan UKM.

2.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

1) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan Indikator Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK) dengan target 300 Koperasi dan UKM tercapai sebesar 240 Koperasi dan UKM.

2) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan Indikator Jumlah Koperasi berkualitas dengan target 10 koperasi tercapai sebesar 10 koperasi

3) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan dengan Indikator Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran dengan target 5 produk tercapai sebesar 5 produk

- 4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Mendukung tugas dan fungsi bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dengan Indikator Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi dengan target 15% tercapai sebesar 15%
- 5) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Mendukung tugas dan fungsi UPTD BPSMB dengan Indikator Persentase capaian target sertifikat mutu barang dengan target 100% tercapai sebesar 100%

2.1.3. Realisasi Program dan Kegiatan yang tahun 2023 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.

- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Mendukung tugas dan fungsi bidang Industri dengan Indikator Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industry dengan target 3 industri tercapai sebesar 4 industri
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Mendukung tugas dan fungsi bidang Industri dengan Indikator Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata dengan target 5% tercapai sebesar 8,24%
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Mendukung tugas dan fungsi bidang Industri dengan Indikator Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya dengan target 10 industri tercapai sebesar 15 industri

2.1.4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2023

Faktor penyebab tidak tercapai target sampai dengan akhir Tahun 2023 karena adanya sisa lelang pengadaan dan efisiensi anggaran dari beberapa rekening belanja sehingga menyebabkan pencapaian target kinerja kurang maksimal. Selain itu juga, adanya faktor eksternal yang cukup berpengaruh terhadap kinerja dinas. Beberapa program yang melebihi target menunjukkan kinerja yang cukup baik, selain itu juga adanya dukungan faktor eksternal.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

2.1.6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan jadwal yang telah ditentukan serta mencari terobosan dana tidak hanya mengandalkan APBD saja. Secara rutin dilakukan evaluasi internal maupun oleh pemerintah daerah, sehingga potensi ketidakberhasilan mencapai target dapat diminimalisir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
SEKRETARIAT										
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	88	90	89,21	99,12222222	0	177,21	1,969

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD	73	73	73	76,1	104,2465753	-	149,1	2,042465753
2.17.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100	-	12	2
2.17.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100	-	8	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100	89	100	94,35	94,35	-	183,35	1,8335
2.17.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	-	80	65	81,25	-	65	0,8125
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	-	25	25	100	12	37	1,48

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	-	2	2	100	-	2	1
2.17.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	3	3	3	100	-	6	2
2.17.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	14	14	14	100	-	28	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60	31	60	60	100	-	91	1,5166666667
2.17.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	-	3	3	100	1	4	1,3333333333
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	-	30	30	100	10	40	1,3333333333
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	-	24	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	28	4	4	100	70	102	25,5
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	-	9	9	100	12	21	2,333333333
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	30	5	5	100	12	47	9,4
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	860	4	4	100	12	876	219

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25	15	25	25	100	-	40	1,6
2.17.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	-	1	1	100	-	1	1
2.17.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	1	7	7	100	1	9	1,285714286
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	-	34	34	100	6	40	1,176470588
2.17.001.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	1	2	2	100	-	3	1,5

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	12	12	12	100	-	24	2
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	12	12	100	50	62	5,166666667
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	-	36	36	100	12	48	1,333333333
2.17.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	-	12	12	100	12	24	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12	12	12	12	100	-	24	2
2.17.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	35	25	25	100	1	61	2,44
2.17.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	-	20	20	100	-	#VALUE!	#VALUE!

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.003	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10	13	10	9,3	93	-	22,3	2,23
2.17.003.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30	100	30	28	93,33333333	-	128	4,266666667
2.17.003.1.01.002	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20	-	20	20	100	25	45	2,25

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520	700	520	520	100	-	1220	2,346153846
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500	285	500	500	100	-	785	1,57
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	300	770	300	285	95	-	1055	3,516666667

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas	10	9	10	10	100	-	19	1,9
2.17.006.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25	13	25	23	92	-	36	1,44
2.17.006.1.01.002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150	-	150	130	86,66666667	26	156	1,04

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.007	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	3	5	3	1	33,33333333	-	6	2
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Pemula	500	242	500	500	100	-	742	1,484

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.007.1.01.001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200	-	200	200	100	115	315	1,575
2.17.008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	10	36	10	3	30	-	39	3,9

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	16	191	16	16	100	-	207	12,9375
2.17.008.1.01.001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	-	50	50	100	40	90	1,8
3.30.002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Keberdayaan Konsumen	60	55	60	0	0	-	55	0,9166666667
		Legalitas Perijinan Perusahaan	10	-	10	0	0	-	0	0

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260	60	260	228	87,69230769	-	288	1,107692308
3.30.002.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	jumlah SKA yang diterbitkan	4000	3814	4000	3740	93,5	3600	11154	2,7885
3.30.002.1.04.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500	-	3500	3740	106,8571429	-	3740	1,068571429

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bapokting	80	71	80	71,79	89,7375	-	142,79	1,784875
3.30.004.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting	12	12	12	12	100	-	24	2
3.30.004.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6		6	6	100	2400	2406	401

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.004.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21	21	21	21	100	-	42	2
3.30.004.1.02.001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	-	12	12	100	12	24	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.004.1.02.002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10	-	10	16	160	14	30	3
3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	16	5	-25,09	-501,8	-	-9,09	-1,818

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2	2	2	3	150	-	5	2,5
3.30.005.1.01.003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	2	2	4	200	5	11	5,5
3.30.005.1.01.005	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50	-	50	55	110	-	55	1,1

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15	15	15	15	100	-	30	2
3.30.006.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	konsumen yang telah diberikan edukasi	1000	1142	1000	1000	100	-	2142	2,142
3.30.006.1.01.001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3	-	3	3	100	-	3	1
3.30.006.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20	6	20	5	25	-	11	0,55

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27	24	27	27	100	-	51	1,888888889
3.30.006.1.03.001	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3	-	3	3	100	-	3	1
3.30.007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5	-	5	5	100	-	5	1
3.30.007.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10	-	10	5	50	-	5	0,5

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.007.1.02.001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14	-	14	15	107,1428571	10	25	1,785714286
3.31.002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	3	2	3	4	133,3333333	5,2	11,2	3,733333333

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5	5	5	5	100	5	15	3
3.31.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	3	-	3	3	100	1	4	1,333333333
3.31.002.1.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	-	1	1	100	1	2	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.002.1.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	-	5	5	100	7	12	2,4
3.31.002.1.01.006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1	1	1	100	1	3	3
3.31.003	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5	5	5	8,24	164,8	5	18,24	3,648

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.003.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22	17	22	28	127,2727273	25	70	3,181818182

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.003.1.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SII Nas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7	-	7	14	200	3	17	2,428571429

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.003.1.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10	-	10	14	140	2	16	1,6
3.31.004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10	12	10	15	150	-	27	2,7

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10	5	10	8	80	3	16	1,6

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.004.1.01.001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	-	4	4	100	1	5	1,25
3.31.004.1.01.002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1	-	1	1	100	1	2	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.31.004.1.01.003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SII Nas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SII Nas	5	-	5	5	100	2	7	1,4
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
3.30.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	96	90	87,18	96,86666667	-	183,18	2,035333333

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	-	200	2
3.30.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26	-	26	26	100	13	39	1,5
3.30.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10	-	10	40	400	-	40	4
3.30.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	-	10	40	400	20	60	6
3.30.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	-	24	2
3.30.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	-	10	10	100	10	20	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	-	7	7	100	4	11	1,571428571
3.30.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	-	24	24	100	24	48	2
3.30.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11	-	11	11	100	11	22	2
3.30.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	-	12	12	100	12	24	2
3.30.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	23	-	23	23	100	-	23	1
3.30.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23	-	23	23	100	10	33	1,434782609
3.30.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	12	12	12	100	-	24	2

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	12	12	100	12	24	2
3.30.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	-	15	15	100	14	14	0,9333333333
3.30.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	-	12	12	100	12	12	1
3.30.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12	12	12	12	100	-	24	2
3.30.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	100	4	12	3

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	25	51	51	100	50	126	2,470588235
3.30.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	-	4	4	100	4	8	2
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100	100	100	100	100	-	200	2
3.30.006.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100	100	100	100	100	-	200	2
3.30.006.1.02.001	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3	-	3	3	100	-	3	1
3.30.006.1.02.002	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60	-	60	198	330	-	198	3,3

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
3.30.006.1.02.003	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1	-	1	1	100	-	1	1
3.30.006.1.02.004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215	2811	2215	2892	130,5643341	-	5703	2,574717833
3.31.3.30.2.17.01.0003	UPTD Pelatihan Koperasi									
2.17.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90	99	90	80	88,88888889	-	179	1,988888889
2.17.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	99,88	99,88	-	199,88	1,9988

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	-	12	12	100	12	24	2
2.17.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25	-	25	4	16	189	193	7,72
2.17.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	-	4	6	150	30	36	9
2.17.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	36	3
2.17.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	-	12	12	100	10	22	1,833333333

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	-	7	7	100	5	5	0,714285714
2.17.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	-	4	4	100	12	16	4
2.17.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	-	12	12	100	12	24	2
2.17.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25	30	25	21	84	-	51	2,04
2.17.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	-	21	21	100	61	82	3,904761905
2.17.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12	12	12	12	100	-	24	2
2.17.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	-	400	400	100	12	412	1,03

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	-	12	12	100	12	24	2
2.17.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12	12	12	12	100	-	24	2
2.17.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	-	3	3	100	16	19	6,333333333
2.17.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	-	80	40	50	105	145	1,8125
2.17.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	-	2	2	100	160	162	81
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEROPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300	300	300	240	80	-	540	1,8

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8 = 7/6	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300	600	300	240	80	660	1500	5
2.17.005.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240	-	240	240	100	660	900	3,75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada isu strategis daerah tahun 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur , Dimana terdapat lima isu yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
3. Peningkatan Aksebilitas dan Konektivitas Infrastruktur
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Dari kelima Isu tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan misi yang ke dua yaitu “Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”. Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain : Sasaran Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian ditetapkan Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai bidang layanan Perangkat Daerah. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2023 implementasinya mencakup pelaksanaan dalam 18 (delapan belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2023, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara
------------------------------------	---	--

Dengan Indikator	:	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)
------------------	---	---

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2023 ini adalah 4,51 %, dan realisasi tingkat capaian sampai dengan Triwulan IV hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 7,43 %, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 164,75 % .

<input checked="" type="checkbox"/> Sasaran II	:	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara
Dengan Indikator	:	<ol style="list-style-type: none">Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim (%)Disparitas Harga Antar Wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II (dua) pada tahun 2023 ini adalah untuk indikator Presentase Ekspor non migas dan nonbatubara terhadap total ekspor kaltim ditetapkan targetnya sebesar 18,97 % dan realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 15,80 %, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 83,29%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 17% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 13,10 %. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka pencapaian semakin baik.

<input checked="" type="checkbox"/> Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III (tiga) pada tahun 2023 adalah dengan nilai 54 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh nilai 57,04 sehingga pencapaian indikator sasarnya sebesar 105,63%.

<input type="checkbox"/> Sasaran IV	:	Peningkatan Usaha Koperasi dan UKM
Dengan Indikator	:	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Omzet Koperasi2. Nilai Omzet UKM

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV (empat) tahun 2023 adalah untuk indikator Nilai Omzet Koperasi sebesar 1,05 Trilyun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 1,14 Trilyun sehingga persentase pencapaian sasarnya sebesar 108,57%. Untuk indikator Nilai Omzet UKM sebesar 52 Triliun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 77,6 Triliun, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 149,23 persen. dapat diliat tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator IKU, IKK	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB	-	-	4.51%	-	-	-	8.94% (Sementara)	-	-	-	Perubahan indikator
2	Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	-	-	18.97%	-	-	-	15,80% (sementara)	-	-	-	Perubahan indikator
3	Disparitas Harga Antar Wilayah	-	-	17%	-	-	-	13.10 %	-	-	-	Perubahan indikator
4	Indeks Keberdayaan Konsumen	-	-	54	-	-	-	57.04 (Dirjen PKTN Nasional)	-	-	-	Perubahan indikator
5	Nilai Omzet Koperasi	-	-	1.05 T	-	-	-	1.03 T	-	-	-	Perubahan indikator
6	Nilai Omzet UKM	-	-	52 T	-	-	-	77.6 T	-	-	-	Perubahan indikator

No	Indikator IKU, IKK	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	-	-	-	6	6	6	-	-	6	6	Indikator mulai tahun 2024
8	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	-	-	-	10.06	10.43	11	-	-	10.43	11	Indikator mulai tahun 2024
9	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	-	-	-	20	22	25	-	-	22	25	Indikator mulai tahun 2024
10	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	-	-	-	566.60	600.60	636.64	-	-	600.60	636.64	Indikator mulai tahun 2024
11	Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)	-	-	-	60	62	64	-	-	62	64	Indikator mulai tahun 2024
12	Pertumbuhan nilai PDRB Sektor	-	-	-	2	6	7	-	-	6	7	Indikator mulai tahun 2024

No	Indikator IKU, IKK	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	koperasi dan UKM (%)											
13	Inflasi pangan bergejolak (%)	-	-	-	4.5	4.4	4.3	-	-	4.4	4.3	Indikator mulai tahun 2024
14	Pertumbuhan Omzet UKM	-	-	-	5.80	6.3	6.8	-	-	6.3	6.8	Indikator mulai tahun 2024
15	Pertumbuhan Omzet Koperasi	-	-	-	19	21	23	-	-	21	23	Indikator mulai tahun 2024
16	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	-	-	-	1.15	1.15	1.15	-	-	1.15	1.15	Indikator mulai tahun 2024
17	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	78.50	79.50	80.01	-	-	79.50	80.01	Indikator mulai tahun 2024
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	-	-	-	85	85.50	86	-	-	85.50	86	Indikator mulai tahun 2024

No	Indikator IKU, IKK	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
19	Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	-	-	-	75.5	77.5	80	-	-	77.5	80	Indikator mulai tahun 2024
20	Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	-	-	-	85	85.50	86	-	-	85.50	86	Indikator mulai tahun 2024
21	Galeri UKM (%)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	Indikator mulai tahun 2024
22	Skor Kepuasan Masyarakat (UPTD BPSMB)	-	-	-	95.6	95.7	96	-	-	95.7	96	Indikator mulai tahun 2024
23	Skor Kepuasan Masyarakat (UPTD Pelatihan Koperasi)	-	-	-	86	87	88	-	-	87	88	Indikator mulai tahun 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi dan Aparatur
 1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur
 2. Masih kurangnya sumber Daya Manusia PNS
- b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
 1. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif, yang mengakibatkan pembubaran koperasi, disinyalir koperasi yang ada terbagi atas koperasi aktif non produktif, koperasi tidak aktif namun produktif dan koperasi tidak aktif dan tidak produktif.
 2. Kurangnya pemahaman para pengurus koperasi mengenai pelaporan pertanggung jawaban Koperasi
 3. Penumuhan UKM sebagai wirausaha baru dan produktif
- c. Urusan Pilihan Perindustrian
 1. Belum Memadainya Infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk koneksi antar wilayah.
 2. Terbatasnya sumber daya manusia industri
 3. Rendahnya komitmen dan respon stakeholder dalam bekerjasama untuk menyelesaikan masalah
 4. Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai kebutuhan industri dan harga yang masih relatif tinggi.
 5. Kelembagaan belum efektif

d. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk non Migas non Batubara
2. Rendahnya Daya Saing Produk yang dipasarkan
3. Belum optimalnya Pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur.
4. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran komoditi dan produk ekspor
5. Terbatasnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok
6. Belum optimal fasilitasi sistem distribusi perdagangan
7. Belum optimal Kerjasama Perdagangan
8. Konsumen Kalimantan Timur pada umumnya masih pada tahap mampu belum kritis.
9. Belum adanya peran aktif masyarakat menggunakan hak dan kewajiban sebagai konsumen
10. Pelaku usaha masih ada yang belum patuh
11. Belum optimal pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur
12. Stabilitas Harga Kebutuhan Masyarakat dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang menjadi masalah-masalah mendesak yaitu antara lain :

1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur ;
2. Perlunya peningkatan kualitas manajemen dan produktivitas Koperasi
3. Kebijakan untuk mendorong tercapainya jumlah RAT Koperasi
4. Sosialisasi tentang Manajemen Perkoperasian
5. Perlu nya Forum FGD lintas Sektor membahas Kawasan Ekonomi khusus
6. Perlunya operasi pasar atau pasar murah agar penstabilkan harga barang pokok yang naik
7. Sosialisasi konsumen cerdas dan pelaku usaha taat SNI

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Secara Keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2025

Sumber Anggaran : APBD

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)		5,56	13.020.000.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)		5,56%	13.226.279.341			
3.31.02.1.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dok)		5	13.020.000.000	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dok)		5 Dokumen	13.226.279.341			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.31.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	25.434.000			
3.31.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	20.076.000			
3.31.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	120.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	28.136.000			
3.31.02.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	10.200.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	10.090.773.809			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.31.02.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 kab/Kota	7 Dokumen	2.100.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 kab/Kota	4 Dokumen	3.025.541.532			
3.31.02.1.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	33.822.000			
3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	1 Laporan	2.496.000			
3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	1 rekomendasi	60.000.000	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	0 rekomendasi	-			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.31.02.1.01.0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	1 rekomendasi	80.000.000	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	0 rekomendasi	-			
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri		0,1	690.000.000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri		10%	574.691.552			
3.31.03.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK output)		25,5	690.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK output)		25,5%	574.691.552			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.31.03.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	10 kab/Kota	3 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	10 kab/Kota	3 Dokumen	-			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.31.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 kab/Kota	2 Dokumen	490.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 kab/Kota	2 Dokumen	-			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.31.03.1.01. 03						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		2 Dokumen	374.737.202		

3.31.03.1.01. 04	<p>Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p> <p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p>	3 Dokumen	199.954.350
---------------------	--	-----------	-------------

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas		0,1902	500.000.000	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas		19,02%	378.514.997		
3.31.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS		3 industri	500.000.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS		3 industri	378.514.997		
3.31.04.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10 kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		10 kab/Kota	1 Dokumen	145.391.873	
3.31.04.1.01.02	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	10 kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		10 kab/Kota	1 Dokumen	95.345.923	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.31.04.1.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	10 kab/Kota	2 Dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	10 kab/Kota	2 Dokumen	137.777.201			
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru		70 Jenis produk	1.895.509.000	Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru		70 Jenis produk	1.837.873.610			
3.30.05.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	1.895.509.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir		10 Pelaku Usaha	1.837.873.610				
3.30.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	10 kab/Kota	3 Pelaku Usaha	726.569.000	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	10 kab/Kota	1 Pelaku Usaha	442.574.800			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.05.1.01.02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal	10 kab/Kota	4 Pelaku Usaha	298.969.000	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal	10 kab/Kota	4 Pelaku Usaha	343.880.000			
3.30.05.1.01.03	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 kab/Kota	5 Prelaku Usaha	306.515.000	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 kab/Kota	5 Prelaku Usaha	295.206.400			
3.30.05.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 kab/Kota	20 Produk	563.456.000	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 kab/Kota	20 Produk	756.212.410			
3.30.05.1.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10 kab/Kota	0	-	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10 kab/Kota	0	-			
3.30.02	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)		100		Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)		100%				
		persentase surat rekomendasi yang tepat waktu		100	648.157.600					354.877.500			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga		0,85			persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga		85%				
3.30.02 .1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	100		280.000.000	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)		100%		108.401.500		
		jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan	9 pelaku usaha				jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan		9 pelaku usaha				
3.30.02 .1.03. 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 kab/Kota	10 Dokumen	130.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 kab/Kota	10 Dokumen	63.002.000			
3.30.02 .1.03. 03	pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	jumlah laporan hasil pengawasan bahan berbahaya		3 Laporan	150.000.000	pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	jumlah laporan hasil pengawasan bahan berbahaya		3 Laporan	45.399.500			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.02 .1.04	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	265	Eksportir	368.157.600	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	265	Eksportir	246.476.000			
3.30.02 .1.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	10 kab/Kota	4000 Dok	368.157.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10 kab/Kota	4000 Dok	246.476.000			
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	0,9		988.785.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	90%		719.357.743			
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)	33,33		336.000.000	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)	33,3%		208.677.127			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.07.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	10 kab/Kota	8	336.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 kab/Kota	8 UMKM	208.677.127			
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (IKK OUTPUT)		23,4375	172.785.000	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (IKK OUTPUT)		23,43%	63.544.000			
3.30.07.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 kab/Kota	15	172.785.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 kab/Kota	15 UMKM	63.544.000			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.07.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi	800 orang	480.000.000		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi	800 orang	447.136.616				
3.30.07.1.03.02	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10 kab/Kota	7 Laporan	480.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10 kab/Kota	7 Laporan	447.136.616			
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)		79	8.660.171.780	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)		79%	4.850.569.077			
3.30.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000	5.477.695.520		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 orang	3.738.773.052				
3.30.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (Pelayanan Pengaduan, Operasional BPSK, Survey IKK)	10 kab/Kota	3 BPSK	3.442.863.600	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	10 kab/Kota	3 BPSK	3.004.164.492			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (Forum, Pembentukan LPKSM, Peningkatan Kompetensi SDM Perlindungan Konsumen, Evaluasi LPKSM)	10 kab/Kota	1 LPKSM	489.748.600	Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10 kab/Kota	1 LPKSM	243.520.000			
3.30.06.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	10 kab/Kota	25 pengaduan	1.545.083.320	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	10 kab/Kota	25 pengaduan	491.088.560			
3.30.06.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan		5%	3.182.476.260	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan		5%	1.111.796.025			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	10 kab/Kota	3 Laporan	1.591.238.130	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	10 kab/Kota	3 Laporan	434.654.646		
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	10 kab/Kota	3 Kasus	1.591.238.130	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	10 kab/Kota	3 Kasus	677.141.379		
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat		34,55%	1.200.000.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat		35,00%	812.542.184		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	0,54	600.000.000		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi		54%	325.550.926			
2.17.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke Pada Anggota KUKM dan Masyarakat	10 kab/Kota	30 unit usaha	600.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 kab/Kota	30 unit usaha	325.550.926			
	kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20	600.000.000		kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi		20%	486.991.258			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel	10 kab/Kota	30 unit usaha	600.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 kab/Kota	30 unit usaha	486.991.258			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase Koperasi Modern binaan provinsi	0,66	2.161.846.500		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase Koperasi Modern binaan provinsi	66%	1.190.169.275				
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	percentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	#REF!	2.161.846.500		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	percentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65%	1.190.169.275				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.06.1.01.09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	10 kab/Kota	11 unit usaha	1.739.204.500	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	10 kab/Kota	29 unit usaha	499.996.440			
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 kab/Kota	30 unit usaha	422.642.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 kab/Kota	30 unit usaha	690.172.835			
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Percentase UKM yang Masuk Pasar Digital		10	2.042.752.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Percentase UKM yang Masuk Pasar Digital		10%	5.343.502.674			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)		7,5	2.042.752.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)		7,50%	5.343.502.674			
2.17.07.1.01.01	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (115 UMKM)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10 kab/Kota	125UKM	785.768.500	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10 kab/Kota	120 Unit Usaha	4.252.979.224			
2.17.07.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	10 kab/Kota	150 Orang	406.983.500	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	10 kab/Kota	120 Orang	279.265.850			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan					Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan						
2.17.07.1.01.05	subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	10 kab/Kota	3500 unit	500.000.000	subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	10 kab/Kota	3500 unit usaha	317.895.600		
2.17.07.1.01.08	subkegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 kab/Kota	150 unit usaha	350.000.000	subkegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 kab/Kota	150 unit usaha	493.362.000		
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor		40 UKM	14.094.139.692	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor		40 UKM	1.690.263.283		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi		455 UKM	14.094.139.692	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah UKM yang di fasilitasi		455 UKM	1.690.263.283		
2.17.08.1.01.01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 kab/Kota	40 UKM	13.561.090.692	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 kab/Kota	40 Unit Usaha		1.390.619.451		
2.17.08.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (258 UKM), Syarat Peserta UKM yang Sudah Punya Hubungan Kerja Dengan Pihak Lain	10 kab/Kota	258 UKM	533.049.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	10 kab/Kota	258 Orang		299.643.832		
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.005.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
2.17.005.1.01 .001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)		0,14	1.305.500.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)		14%	868.676.243		
		Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)		0,9			Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)		90%			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.04.1.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)		100%	300.500.000	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)		100%	279.404.000			
3.30.04.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	2400 laporan	165.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	240 laporan	191.024.000			
3.30.04.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	480 laporan	135.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	48 laporan	88.380.000			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.04.1.02	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau		80	755.000.000	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau		80%	519.642.443			
3.30.04.1.02.01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	10 kab/Kota	15 laporan	465.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	10 kab/Kota	12 laporan	38.478.878			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.04.1.02.02	Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 kab/Kota	15 lap	290.000.000	Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 kab/Kota	15 laporan	481.163.565			
3.30.04.1.03	kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		10 laporan	250.000.000	kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		10 laporan	69.629.800			
3.30.04.1.03.03	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (pkpb)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 kab/Kota	5 laporan	200.000.000	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (pkpb)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 kab/Kota	5 laporan	36.319.600			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.04.1.03.04	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	10 kab/Kota	5 laporan	50.000.000	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	10 kab/Kota	5 laporan	33.310.200			
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan		50	800.000.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan		50%	1.199.856.800			
3.30.03.101	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi , FGD)		7 kegiatan	800.000.000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi , FGD)		7 kegiatan	1.199.856.800			
3.30.03.101.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	10 kab/Kota	3 unit	800.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	10 kab/Kota	3 unit	1.199.856.800			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	88,8	36.993.138.428		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	88,8 Indeks		57.234.468.397			
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%				
2.17.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29	1.645.292.418		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen		1.606.735.966			
2.17.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 kab/Kota	6	768.301.496	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 kab/Kota	6 Dokumen	661.378.966			
2.17.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 kab/Kota	5	155.925.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 kab/Kota	2 Dokumen	152.884.000			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 kab/Kota	4	68.722.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 kab/Kota	2 Dokumen	64.884.000			
2.17.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 kab/Kota	11	468.698.423	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 kab/Kota	11 Laporan	593.661.000			
2.17.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 kab/Kota	3	183.645.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 kab/Kota	2 Laporan	133.928.000			
2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		75 Dok	17.048.580.350	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		75 Dokumen	33.147.981.823			
2.17.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	75 orang	16.071.100.350	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	75 orang / Bulan	32.076.281.749			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 dok	398.360.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 dokumen	648.840.000			
2.17.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 kab/Kota	4	15.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 kab/Kota	4 Dokumen	102.229.667			
2.17.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 kab/Kota	2	215.200.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 kab/Kota	2 Laporan	249.087.303			
2.17.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 kab/Kota	3	223.520.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 kab/Kota	1 Dokumen	1.790.000			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	10 kab/Kota	14	75.400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	10 kab/Kota	14 Laporan	1.750.000		
2.17.01.1.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 kab/Kota	2	50.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 kab/Kota	2 Dokumen	68.003.104		
2.17.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah (SIMDA BARANG, SIKAP , RKMBD , daftar pemeliharaan , laporan rekonsiliasi barang (2) dan laporan penatausahaan		18	245.800.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah		18 Dokumen	157.395.925		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.03.01	SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	50.000.000	SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4 Dokumen	33.156.000		
2.17.01.1.03.02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	50.000.000	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	49.942.000		
2.17.01.1.03.05	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	4	67.200.000	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	4 Laporan	12.577.925		
2.17.01.1.03.06	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	16	15.000.000	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	4 Laporan	14.500.000		
2.17.01.1.03.07	SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda	2	63.600.000	SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	47.220.000		
2.17.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		189	2.413.879.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		189 Orang	2.181.499.550		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.05.01	Subkegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 kab/Kota	4	63.600.000	Subkegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 kab/Kota	7 Unit	36.400.000		
2.17.01.1.05.02	subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 kab/Kota	3	350.709.000	subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 kab/Kota	3 Paket	502.055.342		
2.17.01.1.05.03	subkegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 kab/Kota	3	1.056.450.000	subkegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 kab/Kota	4 Dokumen	499.809.800		
2.17.01.1.05.04	subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 kab/Kota	4	61.200.000	subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 kab/Kota	4 Dokumen	25.642.808		
2.17.01.1.05.05	subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 kab/Kota	4	219.840.000	subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 kab/Kota	2 Dokumen	159.899.600		
2.17.01.1.05.09	subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 kab/Kota	35	662.080.000	subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 kab/Kota	35 Orang	957.692.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	3.196.391.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	Dokumen	4.202.010.340	
2.17.01.1.06.01	subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10	50.020.000	subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	14 Paket		73.430.398	
2.17.01.1.06.02	subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	4	171.957.400	subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	16 Paket		1.135.403.630	
2.17.01.1.06.03	subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	4	20.000.000	subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket		4.675.130	
2.17.01.1.06.04	subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	5	314.562.600	subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	4 paket		1.693.963.833	
2.17.01.1.06.05	subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	12	643.546.400	subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	5 Paket		238.099.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01.1.06.06	subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12	23.270.400	subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	23.270.400			
2.17.01.1.06.08	subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	5	59.410.000	subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	3 Laporan	122.881.800			
2.17.01.1.06.09	subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	12	1.813.625.000	subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	3 Laporan	742.739.600			
2.17.01.1.06.10	subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	4	50.000.000	subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	133.626.840			
2.17.01.1.06.11	subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	50.000.000	subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 Dokumen	33.919.709			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	4.601.496.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Unit	7.649.924.112			
2.17.01.1.07.02	subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	6	2.262.440.000	subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Unit	889.962.000			
2.17.01.1.07.05	subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	3	2.000.000.000	subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	420.769.965			
2.17.01.1.07.06	subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	4	150.000.000	subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	7 Unit	120.643.907			
2.17.01.1.07.08	subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Samarinda	4	50.000.000	subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Unit	488.528.000			
2.17.01.1.07.09	subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	0	500.000	subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	2.287.265.720			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01.1.07.10	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1	89.056.000	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	20 Unit	3.126.166.520			
2.17.01.1.07.11	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1	49.500.000	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	316.588.000			
2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	5.013.644.460	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Kegiatn	5.379.581.800			
2.17.01.1.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12	4.722.300	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	39.885.000			
2.17.01.1.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	36	1.139.400.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	36 Laporan	1.592.230.000			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12	3.869.522.160	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	3.747.466.800		
2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		200	2.828.054.400	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		200 Unit	2.909.338.881		
2.17.01.1.09.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	8	40.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	2 Unit	43.986.900		
2.17.01.1.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	16	437.340.400	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	24 Unit	380.546.565		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	105	188.960.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	416 Unit	258.024.916		
2.17.01.1.09.07	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	103	171.500.000	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	2 Unit	52.730.000		
2.17.01.1.09.08	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Samarinda	1	49.920.000	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Samarinda	5 Unit	88.800.000		
2.17.01.1.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang <u>Dipelihara/Direhabilitasi</u>	Kota Samarinda	10	1.335.600.000	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang <u>Dipelihara/Direhabilitasi</u>	Kota Samarinda	10 Unit	1.848.418.000		
2.17.01.1.09.10	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	3	511.438.000	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	3 Unit	236.832.500		
2.17.01.1.09.12	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Samarinda	1	93.296.000	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Samarinda	1 Ha	-		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)	74	1.619.710.000		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)	74%	1.214.817.780		
		mutu pelayanan BPSMB	(A) 83 %				mutu pelayanan BPSMB	(A) 83 %			
3.30.06.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluhan pelanggan	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	1.619.710.000		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluhan pelanggan	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	1.214.817.780		
		jumlah laporan mutu akreditasi	12				jumlah laporan mutu akreditasi	12 Laporan			
		jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	12				jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	12 IKM			
		persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100				persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100%			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.06.1.02.06	Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	10 Kab/Kota	6	123.800.000	Sub Kegiatan Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	10 Kab/Kota	6 Produk	57.087.600			
3.30.06.1.02.05	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	10 Kab/Kota	180	353.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	180 Laporan	255.078.670			
3.30.06.1.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	1	414.310.000	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	1 Sertifikat	294.747.708			
3.30.06.1.02.04	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	2600	728.600.000	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	2600 Sertifikat	607.903.802			
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8	3.680.290.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8 Indeks				
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		90	90		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%	2.811.727.433			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		13	97.540.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		13 Dokumen	84.120.000		
3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	13	97.540.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	84.120.000		
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20	227.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20 Orang	194.050.000		
3.30.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	1	27.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	0 Paket	-		
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	20	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	20 Orang	194.050.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	624.327.632	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Dokumen	1.280.841.575			
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	12.226.640			
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	4	61.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	6 Paket	513.528.578			
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	24	58.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	24 Paket	262.197.701			
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	11	46.581.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	9 Paket	44.213.856			
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12	2.346.432	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	2.344.800			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	4	19.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	4 Laporan	5.200.000		
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	14	425.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	14 Laporan	441.130.000		
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah		5	100.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah		5 Dokumen	90.582.106		
3.30.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	20.000.000		
3.30.01.1.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	17.400.000		
3.30.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan	Kota Samarinda	12	20.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan	Kota Samarinda	12 Laporan	17.400.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
		Pelaporan Data Retribusi Daerah					Pelaporan Data Retribusi Daerah					
3.30.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	17.400.000		
3.30.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	18.382.106		
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11	580.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11 Unit	121.723.160		
3.30.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	1	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	0 Unit	-		
3.30.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	10	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Unit	121.723.160		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38	1.773.022.368	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38 Kegiatan	768.262.292		
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12	11.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	11.035.796		
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	14	198.450.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	14 Laporan	186.168.000		
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12	1.563.572.368	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	571.058.496		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		58	278.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		58 Unit	272.148.300			
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	4	82.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	4 Unit	77.012.000			
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	50	148.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	50 Unit	148.257.100			
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	4	47.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	46.879.200			
TOTAL BPSMB					5.300.000.000	TOTAL BPSMB					4.026.545.213		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,8	3.750.000.000		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,8 Indeks	3.890.632.126				
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		90		100%							
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	12 Dokumen	93.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		12 Dokumen	87.960.000				
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 bulan	93.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	87.960.000			
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20 orang	155.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20 orang	89.796.000			
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	1	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	0 Paket	-			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	12	90.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	12 Orang	89.796.000		
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dok	529.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	579.380.505				
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12	26.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	25.991.517		
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	75	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	7 Paket	89.707.837		
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	12	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Paket	61.027.747		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah		5	100.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah		5 Dokumen	79.966.947			
2.17.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	11.621.021			
2.17.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	19.999.594			
2.17.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	8.433.696			
2.17.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	19.920.000			
2.17.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12	20.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	19.992.636			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 unit	452.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 unit	415.131.106		
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	1	152.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket	97.417.390		
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	7	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	85 Unit	317.713.716		
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 keg	1.636.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 keg	1.143.804.200		
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	60	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	60 laporan	5.980.200		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12	230.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	225.501.600			
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	9.922.400			
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12	1.350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	902.400.000			
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		18 unit	785.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		18 unit	1.494.593.368			

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	1 Unit	17.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	1 Unit	10.203.000		
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	2 Unit	34.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	2 Unit	33.987.300		
2.17.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Samarinda	15 Unit	27.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Samarinda	15 Unit	9.040.000		
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	12 Bulan	37.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	12 Unit	70.750.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	target	(Rp)			Lokasi	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	12 Bulan	420.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	1 Unit	14.620.000			
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Paket	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	1.355.993.068			
		TOTAL USULAN PAGU PELKOP			5.600.000.000		TOTAL USULAN PAGU PELKOP			5.826.270.111			
	Tota Rancangan Pagu Dinas dan UPTD				95.900.000.000	Tota Rancangan Pagu Dinas dan UPTD				100.134.458.000			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal kordinasi, integrasi, sinkronisasi serta perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan SDM dan Pendapatan UKM dan Koperasi provinsi Kalimantan Timur .

Berikut hasil dari Forum Perangkat Daerah yang merangkum usulan Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota :

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)		5,56%	
3.31.02.1.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dok)		5 Dokumen	
3.31.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	
3.31.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	

KODE (1)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (3)	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING (6)
			Lokasi (4)	target (5)	
3.31.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	
3.31.02.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	
3.31.02.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 kab/Kota	4 Dokumen	
3.31.02.1.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31.02.1.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	1 Laporan	
3.31.02.1.01.0008	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	0 rekomendasi	
3.31.02.1.01.0009	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	10 kab/Kota	0 rekomendasi	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri		10%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31.03.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK ouput)		25,5%	
3.31.03.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi	10 kab/Kota	3 Dokumen	

KODE (1)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (3)	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING (6)
			Lokasi (4)	target (5)	
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 kab/Kota	2 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		2 Dokumen	

3.31.03.1.01.04	<p>Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p>	<p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p>	3 Dokumen	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	19,02%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.31.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS		3 industri	
3.31.04.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10 kab/Kota	1 Dokumen	
3.31.04.1.01.02	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	10 kab/Kota	1 Dokumen	
3.31.04.1.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	10 kab/Kota	2 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru		70 Jenis produk	
3.30.05.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir		10 Pelaku Usaha	
3.30.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	10 kab/Kota	1 Pelaku Usaha	
3.30.05.1.01.02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal	10 kab/Kota	4 Pelaku Usaha	
3.30.05.1.01.03	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 kab/Kota	5 Prelaku Usaha	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.05.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 kab/Kota	20 Produk	
3.30.05.1.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10 kab/Kota	0	
3.30.02	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)	100%		
		persentase ketataan pelaku usaha dalam tertib niaga	85%		
3.30.02 .1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	100%		
		jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan	9 pelaku usaha		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.02 .1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 kab/Kota	10 Dokumen	
3.30.02 .1.03.03	pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	jumlah laporan hasil pengawasan bahan berbahaya		3 Laporan	
3.30.02 .1.04	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA		265 Eksportir	
3.30.02 .1.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10 kab/Kota	4000 Dok	
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri		90%	

KODE (1)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (3)	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING (6)
			Lokasi (4)	target (5)	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)		33,3%	
3.30.07.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 kab/Kota	8 UMKM	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (IKK OUTPUT)		23,43%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.07.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 kab/Kota	15 UMKM	
3.30.07.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi		800 orang	
3.30.07.1.03.02	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10 kab/Kota	7 Laporan	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)		79%	
3.30.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi		1000 orang	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	10 kab/Kota	3 BPSK	
3.30.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10 kab/Kota	1 LPKSM	
3.30.06.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	10 kab/Kota	25 pengaduan	
3.30.06.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan		5%	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	10 kab/Kota	3 Laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	10 kab/Kota	3 Kasus	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat		35,00%	
2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi		54%	
2.17.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 kab/Kota	30 unit usaha	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi		20%	
2.17.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 kab/Kota	30 unit usaha	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi		66%	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha		61,65%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.06.1.01.09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	10 kab/Kota	29 unit usaha	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 kab/Kota	30 unit usaha	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital		10%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)		7,50%	
2.17.07.1.01.01	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10 kab/Kota	120 Unit Usaha	
2.17.07.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	10 kab/Kota	120 Orang	
2.17.07.1.01.05	subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	10 kab/Kota	3500 unit usaha	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.07.1.01.08	subkegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 kab/Kota	150 unit usaha	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor		40 UKM	
2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasii		455 UKM	
2.17.08.1.01.01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 kab/Kota	40 Unit Usaha	
2.17.08.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	10 kab/Kota	258 Orang	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
2.17.005.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
2.17.005.1.01.001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)		14%	
		Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)		90%	
3.30.04.1.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)		100%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.04.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	240 laporan	
3.30.04.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	48 laporan	
3.30.04.1.02	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau		80%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.04.1.02.01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	10 kab/Kota	12 laporan	
3.30.04.1.02.02	Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 kab/Kota	15 laporan	
3.30.04.1.03	kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		10 laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.04.1.03.03	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (pkpb)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 kab/Kota	5 laporan	
3.30.04.1.03.04	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	10 kab/Kota	5 laporan	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan		50%	
3.30.03.101	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi , FGD)		7 kegiatan	
3.30.03.101.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	10 kab/Kota	3 unit	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8 Indeks	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%	
2.17.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		29 Dokumen	
2.17.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 kab/Kota	6 Dokumen	
2.17.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 kab/Kota	2 Dokumen	
2.17.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 kab/Kota	2 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 kab/Kota	11 Laporan	
2.17.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 kab/Kota	2 Laporan	
2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		75 Dokumen	
2.17.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	75 orang / Bulan	
2.17.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 dokumen	
2.17.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 kab/Kota	4 Dokuemn	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 kab/Kota	2 Laporan	
2.17.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 kab/Kota	1 Dokumen	
2.17.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 kab/Kota	14 Laporan	
2.17.01.1.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 kab/Kota	2 Dokumen	
2.17.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah		18 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.03.01	SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4 Dokumen	
2.17.01.1.03.02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	
2.17.01.1.03.05	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	4 Laporan	
2.17.01.1.03.06	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	4 Laporan	
2.17.01.1.03.07	SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	
2.17.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		189 Orang	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.05.01	Subkegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 kab/Kota	7 Unit	
2.17.01.1.05.02	subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 kab/Kota	3 Paket	
2.17.01.1.05.03	subkegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 kab/Kota	4 Dokumen	
2.17.01.1.05.04	subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 kab/Kota	4 Dokumen	
2.17.01.1.05.05	subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 kab/Kota	2 Dokumen	
2.17.01.1.05.09	subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 kab/Kota	35 Orang	
2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.06.01	subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	14 Paket	
2.17.01.1.06.02	subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	16 Paket	
2.17.01.1.06.03	subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket	
2.17.01.1.06.04	subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	4 paket	
2.17.01.1.06.05	subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	
2.17.01.1.06.06	subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.06.08	subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	3 Laporan	
2.17.01.1.06.09	subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	3 Laporan	
2.17.01.1.06.10	subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	
2.17.01.1.06.11	subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 Dokumen	
2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Unit	
2.17.01.1.07.02	subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Unit	
2.17.01.1.07.05	subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.07.06	subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	7 Unit	
2.17.01.1.07.08	subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Unit	
2.17.01.1.07.09	subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	
2.17.01.1.07.10	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	20 Unit	
2.17.01.1.07.11	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	
2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Kegiatn	
2.17.01.1.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	36 Laporan	
2.17.01.1.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	
2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		200 Unit	
2.17.01.1.09.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	2 Unit	
2.17.01.1.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	24 Unit	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	416 Unit	
2.17.01.1.09.07	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	2 Unit	
2.17.01.1.09.08	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Samarinda	5 Unit	
2.17.01.1.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	10 Unit	
2.17.01.1.09.10	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	3 Unit	
2.17.01.1.09.12	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Samarinda	1 Ha	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)		74%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	mutu pelayanan BPSMB		(A) 83 %	-
3.30.06.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluhan pelanggan		≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	
		jumlah laporan mutu akreditasi		12 Laporan	
		jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP		12 IKM	
		persentase capaian penerbitan sertifikat layanan		100%	
3.30.06.1.02.06	Sub Kegiatan Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	10 Kab/Kota	6 Produk	
3.30.06.1.02.05	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	180 Laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.06.1.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	1 Sertifikat	
3.30.06.1.02.04	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	2600 Sertifikat	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8 Indeks	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		13 Dokumen	
3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20 Orang	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	0 Paket	
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	20 Orang	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Dokumen	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	6 Paket	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	24 Paket	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	9 Paket	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	4 Laporan	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	14 Laporan	
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah		5 Dokumen	
3.30.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	
3.30.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	
3.30.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	
3.30.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11 Unit	
3.30.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	0 Unit	
3.30.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Unit	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		38 Kegiatan	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	14 Laporan	

KODE (1)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (3)	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING (6)
			Lokasi (4)	target (5)	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		58 Unit	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	4 Unit	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	50 Unit	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	
TOTAL BPSMB					
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan		4,97%	
2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan		260 Koperasi	
		Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan		480 UKM	
2.17.05.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	10 kab/kota	740 Orang	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8 Indeks	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		12 Dokumen	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20 orang	
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	0 Paket	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	12 Orang	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Dokumen	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	7 Paket	
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Paket	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	15 Paket	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Paket	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	30 Laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	
2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Samarinda	24 Paket	
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah		5 Dokumen	
2.17.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	
2.17.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	
2.17.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	
2.17.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	
2.17.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 unit	
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket	
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	85 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 keg	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	60 laporan	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		18 unit	
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	1 Unit	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	2 Unit	
2.17.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Samarinda	15 Unit	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	12 Unit	
2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	1 Unit	
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan berakhirnya RPJMN Pemerintah Pusat Tahun 2019 – 2024, maka untuk tahun 2025 menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045. Ditahun 2025 sampai dengan 2029 dengan tema memperkuat fondasi transformasi. RPJP Nasional mengenai Perkuatan Fondasi Transformasi

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial
2. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil

Berdasarkan Rancangan RKP tahun 2024 kebijakan nasional sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- A. Sektor Koperasi & UKM
 1. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional
 2. Perhatian khusus pada usaha mikro kecil dengan program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 3. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui program Fasilitasi Sertifikasi HAKI.
 4. Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi dengan program Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi termasuk di daerah tertinggal dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

5. Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial.

Berkaitan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan program kegiatan tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Program yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana kerja yang disusun adalah sebagai berikut Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial, progam ini dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mikro kecil dalam memperoleh akses pembiayaan dan Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional.

Dalam hal mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha telah dilaksanakan program yang membantu pengembangan usaha KUKM. Demikian pula halnya kebijakan pengembangan kewirausahaan telah dilaksanakan dan direncanakan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi dan pelatihan ketrampilan teknis bagi pelaku koperasi. Kebijakan nasional penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, dalam hal ini revitalisasi pasar dan PLUT merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, akan tetapi menimbang kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, kebijakan tersebut masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas sangat diharapkan dukungan pendanaan dari pusat melalui

DAK agar kegiatan revitalisasi pasar dan PLUT dapat diwujudkan di Kalimantan Timur.

B. Sektor Industri

1. Meningkatkan Nilai Tambah sektor Industri
2. Pertumbuhan Industri :
 - a. Pengembangan Perwilayahkan Industri diluar pulau jawa
 - b. Penumbuhan Populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha.
 - c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)
3. Pembangunan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa :
 - a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA, Menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata.
 - b. Percepatan Pembangunan Konektivitas/Infrastruktur.
 - c. Pengembangan SDM dan IPTEK.
 - d. Pengembangan regulasi dan Kebijakan
 - e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian Insentif fiskal dan non-fiskal.

Berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional berdasarkan arah pembangunan kebijakan nasional, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sudah sejalan dan selaras. Dimana pada sektor industri, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Kaltim Industrial Estate (KIE).

Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 dengan total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya.

Kawasan Industri Kariangau (KIK) berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dengan menempati area seluas 133 Ha, dengan rencana pengembangan hingga 3.565 Ha yang selanjutnya akan dikembangkan hingga ke Pulau Balang. KIK memiliki letak strategis karena berada di teluk Balikpapan yang berhadapan langsung dengan selat Makassar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), posisi strategis tersebut memudahkan dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun mancanegara (ekspor-impor). Hal ini ditunjang dengan kedalaman laut Teluk Balikpapan yang dapat dilalui dengan kapal berkapasitas 50.000 ton. Kawasan Industri Kariangau dibangun untuk mengakomodir pembangunan industri kimia, batubara, pengolahan kayu, pengeboran minyak, pupuk dan aneka industri lainnya. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 20 pabrik yang sudah mengantongi izin membuat pabrik, dimana 13 diantaranya sudah beroperasi menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Perusahaan yang

sudah beroperasi antara lain bergerak dalam pengolahan CPO (Crude Palm Oil), pertambangan, batubara, dan migas, industri perkapalan, industri logam, tekstil perkayuan, serta pergudangan. Dalam menjalankan fungsinya, Kawasan Industri Kariangau didukung oleh infrastruktur terminal peti kemas, pembangkit tenaga listrik, jalan akses, jembatan dan jalan tol.

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE), awalnya bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri yang menyediakan lahan bagi berbagai perusahaan berbasis gas bumi, yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 di Bontang oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PT. Pupuk Kaltim). KIni PT. KIE telah berkembang menjadi diversified firm sehingga saat ini ada lima pilar bisnis yakni : Kawasan Industri, Rekayasa dan Konstruksi, Properti, Beton dan Trading. Komitmen jajaran PT. KIE untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses bisnis dan memahami kebutuhan konsumen, serta dukungan penuh PT. Pupuk Kaltim merupakan faktor kunci keberhasilan PT. KIE dalam mengembangkan bisnis-bisnis ini.

PT. KIE merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Kaltim yang juga merupakan pengelola Kaltim Industrial Estate dengan luas ± 230 Ha, kepemilikan saham sebesar 99,99% PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan produsen pupuk dengan kapasitas produksi urea ± 3,43 juta ton per tahun, amoniak sebanyak ± 2,74 juta ton per tahun dan NPK ± 350 ribu ton per tahun.

C. Sektor Perdagangan

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah.
 - a. Pemantauan dan informasi harga & stok kebutuhan bahan pokok dan barang strategis.

- b. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Bahan Pokok dan Strategis.
 - c. Penanganan/ pemantauan jalur distribusi bahan pokok dan barang strategis.
 - d. Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim.
 - e. Sosialisasi Perlindungan Konsumen
 - f. Sosialisasi Cinta Produk Indonesia
2. Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi.
- a. Pengawasan Barang Beredar di 10 Kabupaten/Kota.
 - b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi Bidang Perdagangan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional.
 - Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) melalui pengembangan tagline promosi bersama antar Kementerian dan pengembangan nation branding.
 - Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa dengan penyediaan informasi/katalog produk buatan Indonesia dan melakukan upaya aktif untuk menjadikan Indonesia pemasok jaringan produksi global.
 - d. Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para eksportir baru.
 - Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor.
 - Peningkatan ekspor produk KUMKM melalui program kemitraan, fasilitasi ekspor diversifikasi produk dan standarisasi dan inovasi.

Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2025 diatas secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan

program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja (Renja) 2025 melalui kegiatan yang didanai oleh APBD dan didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat (APBN), sebagai berikut penyelarasannya target Nasional dengan daerah :

Tabel 3.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Prov
			2025
-1	-2	-3	-4
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	40
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	75
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	55,77
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	74
4	Tertib Usaha	%	100
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	79
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,15
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	16
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	118
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	25,5

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan RPD 2025-2026:

Tabel 3. 1 Tujuan Renstra 2025-2026 Disperindagkop

SASARAN RPD PROV KALTIM	TUJUAN DISPERINDAGKOP
Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	1. Terwujudnya diversifikasi ekonomi sektor Industri
	2. Terwujudnya diversifikasi ekonomi Sektor Perdagangan
Sasaran 6 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	3. Meningkatkannya keberdayaan ekonomi masyarakat.
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan

Sasaran peningkatan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Beberapa sasaran yang dapat diidentifikasi terkait

peningkatan kontribusi industri pengolahan Kaltim antara lain Peningkatan produksi dan kualitas: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk industri pengolahan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional.

Diversifikasi produk: Sasaran ini bertujuan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan terhadap produk baru serta mengeksplorasi produk yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur.

Peningkatan ekspor: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk industri pengolahan dari Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas pasar ekspor, mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, serta meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar internasional.

Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam transportasi, distribusi, dan penyimpanan produk industri pengolahan di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, menyediakan fasilitas pergudangan dan jaringan distribusi yang efisien, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pengolahan di Kalimantan Timur.

Dengan implementasi sasaran-sasaran di atas, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor.

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi di Kalimantan Timur, serta meningkatkan daya saing komoditi dan ekspor di pasar domestik dan internasional. Beberapa strategi untuk mencapai terkait peningkatan daya saing komoditi dan ekspor Kaltim, meningkatkan produksi komoditi dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai dengan stake holder pengembangan teknologi pertanian dan peternakan yang modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta peningkatan keahlian petani dan peternak melalui pelatihan dan pendidikan, mengembangkan komoditi baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi komoditi yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur serta melakukan riset dan pengembangan terhadap komoditi, strategi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui promosi dan branding produk, penyediaan informasi pasar dan pembeli potensial, serta kerjasama dengan pelaku bisnis dan industri yang memiliki jaringan luas di pasar domestik dan internasional.

Untuk menunjang sasaran ini diawali Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan transportasi, pengiriman, dan distribusi produk komoditi di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan komoditi dan ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur transportasi, perbaikan jalur distribusi dan penyediaan fasilitas pergudangan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor komoditi dan ekspor di Kalimantan Timur.

3. Sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Sasaran peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup konsumen di provinsi Kalimantan Timur. Dalam sasaran ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada konsumen terhadap produk dan layanan yang berkualitas serta mengembangkan kapasitas konsumen untuk memahami dan menggunakan produk dan layanan secara efektif.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk dan layanan yang tersedia di Kaltim. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang memproduksi produk dan layanan berkualitas tinggi, dan memperkuat kemitraan antara produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan produk lokal yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, agar masyarakat lebih tertarik dan merasa bangga menggunakan produk-produk tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas konsumen juga menjadi fokus dalam sasaran ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta cara memilih dan menggunakan produk dan layanan dengan bijak dan efektif. Dengan meningkatkan kapasitas konsumen, diharapkan konsumen akan lebih berdaya dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari penipuan atau penggunaan produk dan layanan yang berbahaya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi yang memadai mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar. Dengan adanya informasi yang akurat dan mudah diakses, konsumen akan lebih mudah memilih produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Sasaran Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

5. Sasaran Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.

Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi, dan ekspor non-migas di Kaltim adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perdagangan, industri, dan ekspor non-migas di provinsi tersebut. Sasaran ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kaltim dan meningkatkan daya saing produk dan komoditi di pasar global.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan efisiensi sistem distribusi perdagangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur logistik yang memadai, seperti pelabuhan, jalan tol, dan jaringan transportasi

lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka distribusi komoditi dan produk non-migas di Kaltim dapat menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, arah kebijakan Pusat Distribusi (Food Station) lokasi pusat yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang ke pelanggan atau lokasi penjualan. Pusat distribusi dapat berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, serta sebagai pusat kontrol untuk pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan persediaan, Fungsi utama dari pusat distribusi adalah:

Penyimpanan dan pengelolaan persediaan: Pusat distribusi digunakan untuk menyimpan barang-barang dari berbagai produsen sehingga dapat dikirimkan ke berbagai tujuan secara efisien. Dalam pusat distribusi, persediaan barang dipantau dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup saat diperlukan.

Pengolahan dan pengemasan: Pusat distribusi sering kali dilengkapi dengan fasilitas untuk mengemas dan memproses barang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Fasilitas ini mencakup pelabelan, pengemasan ulang, dan perakitan produk.

Pengiriman dan distribusi: Pusat distribusi berfungsi sebagai pusat pengiriman dan distribusi barang ke lokasi penjualan atau konsumen akhir. Pengiriman dilakukan melalui berbagai mode transportasi, termasuk truk, kapal, dan pesawat terbang.

Pengendalian mutu dan audit: Pusat distribusi juga digunakan untuk memeriksa kualitas dan keamanan produk sebelum dikirim ke pelanggan. Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa proses distribusi berjalan dengan lancar dan efektif.

6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebijakan, program, dan anggaran di dalam Disperindagkop. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan, audit internal, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Melalui transparansi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan tentang kinerja dan penggunaan sumber daya Disperindagkop.

Mengembangkan indikator kinerja yang jelas: Disperindagkop perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, Disperindagkop dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan jumlah perizinan usaha, peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan, peningkatan pendapatan koperasi, dan sebagainya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat: Disperindagkop perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program di sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Melalui partisipasi masyarakat, kebijakan dan program yang diimplementasikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Disperindagkop dapat melakukan berbagai bentuk partisipasi, seperti melalui konsultasi publik, dialog dengan pelaku usaha, atau pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Meningkatkan kualitas layanan publik: Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Disperindagkop kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi, responsivitas terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas. Disperindagkop dapat melakukan langkah-langkah

seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pelatihan staf dalam pelayanan publik yang baik, dan pengembangan sistem umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diberikan.

7. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat dijelaskan sebagai perbaikan dan peningkatan transparansi, tanggung jawab, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang:

Transparansi: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menerapkan praktik-praktik transparan dalam operasionalnya. Ini berarti memberikan akses informasi yang mudah dipahami dan komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur pengujian, kriteria sertifikasi mutu barang, biaya yang terkait, dan hasil pengujian.

Standar dan Kualitas: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang disediakan. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian yang akurat, peralatan yang mutakhir, serta tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas.

Evaluasi Kinerja: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil kerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan peninjauan internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian dan sertifikasi mutu barang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu

Barang dapat mengadakan forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan yang diberikan.

Penanganan Keluhan: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dari masyarakat. Keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan solusi yang memadai harus diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi.

Akuntabilitas Internal: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu memastikan bahwa ada sistem akuntabilitas internal yang kuat di tempatnya. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ini akan membantu memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen

8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Pelatihan Koperasi .

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi mengacu pada usaha untuk memperbaiki transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pengembangan koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UPTD tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pelatihan koperasi.

Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi:

Transparansi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menerapkan prinsip transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Ini meliputi menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program pelatihan yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, biaya yang terkait, jadwal, dan evaluasi hasil pelatihan.

Standar Kualitas: UPTD Pelatihan Koperasi harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan relevan dan up-to-date, fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta melibatkan instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang koperasi.

Evaluasi Kinerja: UPTD Pelatihan Koperasi perlu melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur efektivitas pelatihan yang diselenggarakan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepuasan peserta, tingkat kelulusan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta dampak pelatihan terhadap pengembangan koperasi di masyarakat.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas. UPTD Pelatihan Koperasi dapat melibatkan komunitas koperasi, asosiasi, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan penilaian program pelatihan.

Pengawasan Internal: UPTD Pelatihan Koperasi harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran.

Komunikasi dan Informasi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik itu melalui media sosial, situs web, atau pusat informasi. Informasi mengenai program pelatihan, proses pendaftaran, dan hasil evaluasi harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat

Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, Disperindagkop dapat mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, dan koperasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan strategi dan program-program ini, diharapkan dapat tercapai

Tabel 3.3 Target Indikator Utama Tahun 2025

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Sasaran Tahun 2025
1	TUJUAN 1 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri	LPE Sektor Industri Pengolahan	6%	1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan"	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	10,43
2	TUJUAN 2 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	22%	2 Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	600,60
				3 Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen"	Nilai indeks keberdayaan konsumen (poin)	62
3	TUJUAN 3 : Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat.	Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM	6%	4 Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omzet Koperasi	21%
		Inflasi pangan bergejolak (%)	4,4%	5 Peningkatan efisiensi Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan Ozmet UKM	6,3%
					Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	1,15
4	Tujuan 4 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	79,50	6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop	Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	77,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	85,50		Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	85,50
					Galeri UKM (%)	-

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Sasaran Tahun 2025
			7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)	Skor Kepuasan Masyarakat	95,7
			8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)	Skor Kepuasan Masyarakat	87

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah . Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ada 18 program, 26 kegiatan dan 154 sub kegiatan . Untuk lokasi kegiatan hampir di semua wilayah Provinsi Kalimantan Timur Kebutuhan dana APBD Rp. 95.900.000.000 Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan Rancangan Akhir maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu :

Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen <u>RKA- SKPD</u>
			3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan <u>Tanggapan Pemeriksaan</u>
			10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<p>11 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>13 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</p>
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<p>14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</p> <p>15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>16 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>17 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>18 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>20 Penyediaan Peralatan dan <u>Perlengkapan Kantor</u></p> <p>21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>25 Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan <u>Konsultasi SKPD</u></p> <p>27 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p>
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>28 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>29 Pengadaan Mebel</p> <p>30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>31 Pengadaan Aset Tak Berwujud</p> <p>32 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
			34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			41	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			42	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
			43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	9	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
				47 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	48 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				49 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
5	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	11	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	50 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
			51	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	12 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	52	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			53	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	13 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	54	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			55	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		14 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	56	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	57	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	16 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	58	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
			59	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
		17 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	60	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
			61	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
		18 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	62 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
			63 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	19 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Eksport Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	64 Pameran Dagang Internasional/Nasional
			65 Pameran Dagang Lokal
			66 Misi Dagang bagi Produk Eksport Unggulan
			67 Peningkatan Citra Produk Eksport
			68 Pembinaan Pelaku Usaha Eksport
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	19 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	69 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
			70 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
			71 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
		20 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	72 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	73 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		22 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	74 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		23 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
13	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	24 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	76 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
			77	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri
			78	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			79	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
			80	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			81	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	82	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			83	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	84	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)
			85	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIIINas
			86	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi <u>dalam Penyampaian Data ke SIIINas</u>
16	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	27 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	87	Verifikasi Mutu Produk
			88	Pengembangan Layanan Pengujian
			89	Pengembangan Layanan Sertifikasi
			90	Pengembangan Layanan Kalibrasi
17	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	28 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	91	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
18	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	29 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	92	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Tabel 3.5 Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tertuang dalam prioritas Pembangunan Tahun 2025.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2025 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	PAGU INDIKATIF
PP 3 : Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.	Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi pendampingan	455 UKM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	kajian Rumah Produksi Bersama			1.713.260.000,00
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang				484.590.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2025 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN	PAGU INDIKATIF
											SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH DAN USAHA MIKRO	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5%	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7,5 %	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	115 Unit Usaha			598.180.000,00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang		369.985.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase keberhasilan produk potensial ekspor menembus pasar ekspor	2%	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha			350.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2025 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN	Sub Kegiatan (Minimal Kab/Kota)	PAGU INDIKATIF
					lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									
								Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha			250.000.000,00	
								Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha			260.000.000,00	
								Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk			360.000.000,00	
								Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha			350.000.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5,20%	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	4 Dok	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Jasa Konsultasi Kawasan industry			150.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2025 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN	PAGU INDIKATIF
												SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA)	
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen			300.000.000,00
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			120.000.000,00
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	kajian Rumah Produksi Bersama		400.000.000,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET PROGRAM 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2025 (OUTPUT DLL)	LOKUS PELAKSANAAN	PAGU INDIKATIF
												Sub Kegiatan (Minimal Kab/Kota)	
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen			1.700.000.000,00
								Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen			150.000.000,00

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berisikan Program dan Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing.” sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya ,berikut Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)		5,56%	13.226.279.341	5,92	12.920.000.000	
3.31.02.1.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dok)		5 Dokumen	13.226.279.341	5	12.920.000.000	
3.31.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	25.434.000	1 Dokumen	150.000.000	
3.31.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	20.076.000	1 Dokumen	100.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	28.136.000	1 Dokumen	120.000.000	
3.31.02.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	10.090.773.809	1 Dokumen	10.000.000.000	
3.31.02.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 kab/Kota	4 Dokumen	3.025.541.532	7 Dokumen	2.200.000.000	
3.31.02.1.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10 kab/Kota	1 Dokumen	33.822.000	1 Dokumen	150.000.000	
3.31.02.1.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahkan industri	10 kab/Kota	1 Laporan	2.496.000	1 Dokumen	60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.02.1.01.0008	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahkan industri	10 kab/Kota	0 rekomendasi	-	1 rekomendasi	60.000.000	
3.31.02.1.01.0009	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahkan industri	10 kab/Kota	0 rekomendasi	-	1 rekomendasi	80.000.000	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri		10%	574.691.552	0,15	700.000.000	
3.31.03.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK ouput)		25,5%	574.691.552	26	700.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.03.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	10 kab/Kota	3 Dokumen	-	3 Dokumen	200.000.000	
3.31.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 kab/Kota	2 Dokumen	-	2 Dokumen	500.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		2 Dokumen	374.737.202	-	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.03.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.		3 Dokumen	199.954.350	-	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas		19,02%	378.514.997	0,1958	500.000.000	
3.31.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS		3 industri	378.514.997	3 industri	500.000.000	
3.31.04.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10 kab/Kota	1 Dokumen	145.391.873	1 Dokumen	150.000.000	
3.31.04.1.01.02	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	10 kab/Kota	1 Dokumen	95.345.923	1 Dokumen	100.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.04.1.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	10 kab/Kota	2 Dokumen	137.777.201	2 Dokumen	250.000.000	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru		70 Jenis produk	1.837.873.610	73 Jenis produk	2.085.059.900	
3.30.05.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir		10 Pelaku Usaha	1.837.873.610	10 Pelaku Usaha	2.085.059.900	
3.30.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	10 kab/Kota	1 Pelaku Usaha	442.574.800	4 Pelaku Usaha	769.225.900	
3.30.05.1.01.02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal	10 kab/Kota	4 Pelaku Usaha	343.880.000	4 Pelaku Usaha	328.865.900	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.05.1.01.03	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 kab/Kota	5 Prelaku Usaha	295.206.400	5 Prelaku Usaha	337.166.500	
3.30.05.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 kab/Kota	20 Produk	756.212.410	20 Produk	649.801.600	
3.30.05.1.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10 kab/Kota	0	-	20 Pelaku Usaha	-	
3.30.02	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)		100%	354.877.500	100	731.789.120	
		persentase ketataan pelaku usaha dalam tertib niaga		85%		100		
3.30.02 .1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)		100%	108.401.500	100	290.000.000	
		jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan		9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.02 .1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengencer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 kab/Kota	10 Dokumen	63.002.000	10 Dokumen	140.000.000	
3.30.02 .1.03.03	pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	jumlah laporan hasil pengawasan bahan berbahaya		3 Laporan	45.399.500	3 Laporan	150.000.000	
3.30.02 .1.04	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA		265 Eksportir	246.476.000	270 Eksportir	441.789.120	
3.30.02 .1.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10 kab/Kota	4000 Dok	246.476.000	4100 Dok	441.789.120	
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Percentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri		90%	719.357.743	1	1.150.380.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)		33,3%	208.677.127	41,67	420.000.000	
3.30.07.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 kab/Kota	8 UMKM	208.677.127	10,00	420.000.000	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (IKK OUTPUT)		23,43%	63.544.000	45,45	230.380.000	
3.30.07.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 kab/Kota	15 UMKM	63.544.000	20	230.380.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.07.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi		800 orang	447.136.616	800 orang	500.000.000	
3.30.07.1.03.02	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10 kab/Kota	7 Laporan	447.136.616	7 Laporan	500.000.000	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Percentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)		79%	4.850.569.077	80	9.566.188.958	
3.30.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi		1000 orang	3.738.773.052	1000	6.025.465.072	
3.30.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	10 kab/Kota	3 BPSK	3.004.164.492	3 BPSK	3.787.149.960	
3.30.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10 kab/Kota	1 LPKSM	243.520.000	1 LPKSM	538.723.460	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.06.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	10 kab/Kota	25 pengaduan	491.088.560	30 pengaduan	1.699.591.652	
3.30.06.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan		5%	1.111.796.025	5%	3.540.723.886	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	10 kab/Kota	3 Laporan	434.654.646	3 Laporan	1.770.361.943	
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	10 kab/Kota	3 Kasus	677.141.379	3 Kasus	1.770.361.943	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Percentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat		35,00%	812.542.184	35,53%	1.500.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Percentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi		54%	325.550.926	0,7524	750.000.000	
2.17.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 kab/Kota	30 unit usaha	325.550.926	46 unit usaha	750.000.000	
	kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Percentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi		20%	486.991.258	20	750.000.000	
2.17.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 kab/Kota	30 unit usaha	486.991.258	46 unit usaha	750.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase Koperasi Modern binaan provinsi		66%	1.190.169.275	1	2.378.031.150	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha		61,65%	1.190.169.275	63,65%	2.378.031.150	
2.17.06.1.01.09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	10 kab/Kota	29 unit usaha	499.996.440	12 unit usaha	1.913.124.950	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 kab/Kota	30 unit usaha	690.172.835	46 unit usaha	464.906.200	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Percentase UKM yang Masuk Pasar Digital		10%	5.343.502.674	15	2.121.328.850	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Percentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)		7,50%	5.343.502.674	7,5	2.121.328.850	
2.17.07.1.01.01	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10 kab/Kota	120 Unit Usaha	4.252.979.224	140 UKM	864.345.350	
2.17.07.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	10 kab/Kota	120 Orang	279.265.850	150 Orang	406.983.500	
2.17.07.1.01.05	subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	10 kab/Kota	3500 unit usaha	317.895.600	3500 unit	500.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.07.1.01.08	subkegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 kab/Kota	150 unit usaha	493.362.000	150 unit usaha	350.000.000	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor		40 UKM	1.690.263.283	60 UKM	17.525.756.486	
2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasii		455 UKM	1.690.263.283	455 UKM	17.525.756.486	
2.17.08.1.01.01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 kab/Kota	40 Unit Usaha	1.390.619.451	40 UKM	16.939.402.586	
2.17.08.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	10 kab/Kota	258 Orang	299.643.832	258 UKM	586.353.900	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							
2.17.005.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
2.17.005.1.01.001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)		14%	868.676.243	0,12	1.398.000.000	
		Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)		90%		0,92		
3.30.04.1.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)		100%	279.404.000	100%	335.000.000	
3.30.04.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	240 laporan	191.024.000	2400 laporan	185.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.04.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	10 kab/Kota	48 laporan	88.380.000	480 laporan	150.000.000	
3.30.04.1.02	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau		80%	519.642.443	85	813.000.000	
3.30.04.1.02.01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	10 kab/Kota	12 laporan	38.478.878	15 lap	487.500.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.04.1.02.02	Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 kab/Kota	15 laporan	481.163.565	16 lap	325.500.000	
3.30.04.1.03	kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		10 laporan	69.629.800	10 laporan	250.000.000	
3.30.04.1.03.03	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (pkpb)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 kab/Kota	5 laporan	36.319.600	5 laporan	200.000.000	
3.30.04.1.03.04	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	10 kab/Kota	5 laporan	33.310.200	5 laporan	50.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan		50%	1.199.856.800	100	900.000.000	
3.30.03.101	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi , FGD)		7 kegiatan	1.199.856.800	10 kegiatan	900.000.000	
3.30.03.101.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	10 kab/Kota	3 unit	1.199.856.800	2 unit	900.000.000	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8 Indeks	57.234.468.397	89	32.523.465.536	
		Percentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		100		
2.17.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		29 Dokumen	1.606.735.966	29	1.645.292.418	
2.17.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 kab/Kota	6 Dokumen	661.378.966	6	768.301.496	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 kab/Kota	2 Dokumen	152.884.000	5	155.925.000	
2.17.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 kab/Kota	2 Dokumen	64.884.000	4	68.722.500	
2.17.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 kab/Kota	11 Laporan	593.661.000	11	468.698.423	
2.17.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 kab/Kota	2 Laporan	133.928.000	3	183.645.000	
2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		75 Dokumen	33.147.981.823	75 Dok	17.048.580.350	
2.17.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	75 orang / Bulan	32.076.281.749	75 orang	16.071.100.350	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 dokumen	648.840.000	12 dok	398.360.000	
2.17.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 kab/Kota	4 Dokumen	102.229.667	4	15.000.000	
2.17.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 kab/Kota	2 Laporan	249.087.303	2	215.200.000	
2.17.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 kab/Kota	1 Dokumen	1.790.000	3	223.520.000	
2.17.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 kab/Kota	14 Laporan	1.750.000	14	75.400.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 kab/Kota	2 Dokumen	68.003.104	2	50.000.000	
2.17.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah		18 Dokumen	157.395.925	18	245.800.000	
2.17.01.1.03.01	SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4Dokumen	33.156.000	1	50.000.000	
2.17.01.1.03.02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	49.942.000	1	50.000.000	
2.17.01.1.03.05	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	4 Laporan	12.577.925	4	67.200.000	
2.17.01.1.03.06	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Samarinda	4 Laporan	14.500.000	16	15.000.000	
2.17.01.1.03.07	SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	47.220.000	2	63.600.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		189 Orang	2.181.499.550	189	2.013.170.000	
2.17.01.1.05.01	Subkegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 kab/Kota	7 Unit	36.400.000	4	63.600.000	
2.17.01.1.05.02	subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 kab/Kota	3 Paket	502.055.342	0	-	
2.17.01.1.05.03	subkegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 kab/Kota	4 Dokumen	499.809.800	3	1.006.450.000	
2.17.01.1.05.04	subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 kab/Kota	4 Dokumen	25.642.808	4	61.200.000	
2.17.01.1.05.05	subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 kab/Kota	2 Dokumen	159.899.600	4	219.840.000	
2.17.01.1.05.09	subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 kab/Kota	35 Orang	957.692.000	40	662.080.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Dokumen	4.202.010.340	12	3.196.391.800	
2.17.01.1.06.01	subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	14 Paket	73.430.398	10	50.020.000	
2.17.01.1.06.02	subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	16 Paket	1.135.403.630	4	171.957.400	
2.17.01.1.06.03	subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket	4.675.130	4	20.000.000	
2.17.01.1.06.04	subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	4 paket	1.693.963.833	5	314.562.600	
2.17.01.1.06.05	subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	238.099.000	12	643.546.400	
2.17.01.1.06.06	subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	23.270.400	12	23.270.400	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.06.08	subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	3 Laporan	122.881.800	5	59.410.000	
2.17.01.1.06.09	subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	3 Laporan	742.739.600	12	1.813.625.000	
2.17.01.1.06.10	subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Samarinda	2 Dokumen	133.626.840	4	50.000.000	
2.17.01.1.06.11	subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 Dokumen	33.919.709	1	50.000.000	
2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Unit	7.649.924.112	100	339.056.000	
2.17.01.1.07.02	subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Unit	889.962.000	0	-	
2.17.01.1.07.05	subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda	3 Paket	420.769.965	1	100.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.07.06	subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	7 Unit	120.643.907	2	50.000.000	
2.17.01.1.07.08	subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Unit	488.528.000	4	49.500.000	
2.17.01.1.07.09	subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	2.287.265.720	0	500.000	
2.17.01.1.07.10	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	20 Unit	3.126.166.520	1	89.056.000	
2.17.01.1.07.11	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	316.588.000	1	50.000.000	
2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Kegiatn	5.379.581.800	12	5.207.120.568	
2.17.01.1.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	39.885.000	12	4.722.300	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	36 Laporan	1.592.230.000	36	1.139.400.000	
2.17.01.1.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	3.747.466.800	12	4.062.998.268	
2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		200 Unit	2.909.338.881	200	2.828.054.400	
2.17.01.1.09.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	2 Unit	43.986.900	8	40.000.000	
2.17.01.1.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	24 Unit	380.546.565	16	437.340.400	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	416 Unit	258.024.916	105	188.960.000	
2.17.01.1.09.07	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	2 Unit	52.730.000	103	171.500.000	
2.17.01.1.09.08	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Samarinda	5 Unit	88.800.000	1	49.920.000	
2.17.01.1.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	10 Unit	1.848.418.000	10	1.335.600.000	
2.17.01.1.09.10	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	3 Unit	236.832.500	3	511.438.000	
2.17.01.1.09.12	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Samarinda	1 Ha	-	1	93.296.000	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)		74%	1.214.817.780	75	2.061.474.239	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		mutu pelayanan BPSMB		(A) 83 %		(A) 84 %		
3.30.06.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluhan pelanggan		≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	1.214.817.780	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	2.061.474.239	
		jumlah laporan mutu akreditasi		12 Laporan		12		
		jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP		12 IKM		14		
		persentase capaian penerbitan sertifikat layanan		100%		100		
3.30.06.1.02.06	Sub Kegiatan Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	10 Kab/Kota	6 Produk	57.087.600	6	191.180.000	
3.30.06.1.02.05	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	180 Laporan	255.078.670	195	508.800.000	
3.30.06.1.02.07	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	1 Sertifikat	294.747.708	1	510.741.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.06.1.02.04	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	10 Kab/Kota	2600 Sertifikat	607.903.802	2800	850.753.239	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8 Indeks	2.811.727.433	89	3.738.525.761	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		100		
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		13 Dokumen	84.120.000	13	97.540.000	
3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	84.120.000	13	97.540.000	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20 Orang	194.050.000	20	228.000.000	
3.30.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	0 Paket	-	1	28.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	20 Orang	194.050.000	20	200.000.000	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Dokumen	1.280.841.575	7	629.762.275	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	12.226.640	10	12.000.000	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	6 Paket	513.528.578	4	65.000.000	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	24 Paket	262.197.701	24	59.400.000	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	9 Paket	44.213.856	11	46.581.200	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	2.344.800	12	2.581.075	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	4 Laporan	5.200.000	4	19.200.000	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	14 Laporan	441.130.000	14	425.000.000	
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah		5 Dokumen	90.582.106	5	100.000.000	
3.30.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	20.000.000	12	20.000.000	
3.30.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	17.400.000	12	20.000.000	
3.30.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	17.400.000	12	20.000.000	
3.30.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	17.400.000	12	20.000.000	
3.30.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Laporan	18.382.106	12	20.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11 Unit	121.723.160	10	500.000.000	
3.30.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda	0 Unit	-	1	400.000.000	
3.30.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Unit	121.723.160	10	100.000.000	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38 Kegiatan	768.262.292	38	1.867.123.486	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	11.035.796	12	12.000.000	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	14 Laporan	186.168.000	14	208.372.500	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	571.058.496	12	1.646.750.986	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		58 Unit	272.148.300	58	316.100.000	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	4 Unit	77.012.000	4	90.750.000	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	50 Unit	148.257.100	50	163.350.000	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	46.879.200	4	62.000.000	
	TOTAL BPSMB				4.026.545.213		5.800.000.000	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Percentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan		4,97%	1.935.637.985	8%	2.000.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan		260 Koperasi	1.935.637.985	2200 orang	2.000.000.000	
		Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan		480 UKM				
2.17.05.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	10 kab/kota	740 Orang	1.935.637.985	2200 orang	2.000.000.000	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		88,8 Indeks		89	4.000.000.000	
					3.890.632.126			
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		12 Dokumen	87.960.000	12 bulan	95.000.000	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	87.960.000	12 bulan	95.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi		20 orang	89.796.000	20 orang	165.000.000	
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	0 Paket	-	1	70.000.000	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	12 Orang	89.796.000	15	95.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Dokumen	579.380.505	12 Dok	563.200.000	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Paket	25.991.517	12	27.000.000	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	7 Paket	89.707.837	80	80.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Paket	61.027.747	12	40.000.000	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	15 Paket	39.797.942	12	29.000.000	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Paket	43.899.900	12	45.000.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	30 Laporan	209.927.850	35	220.000.000	
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Dokumen	2.100.000	12	2.200.000	
2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Samarinda	24 Paket	106.927.712	24	120.000.000	
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah		5 Dokumen	79.966.947	5	100.000.000	
2.17.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	12 Dokumen	11.621.021	12	20.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 keg	1.143.804.200	12 keg	1.602.000.000	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	60 laporan	5.980.200	60	7.000.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	225.501.600	12	240.000.000	
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	9.922.400	12	55.000.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	12 Laporan	902.400.000	12	1.300.000.000	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		18 unit	1.494.593.368	18 unit	969.800.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	1 Unit	10.203.000	1 Unit	19.000.000	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	2 Unit	33.987.300	2 Unit	38.000.000	
2.17.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Samarinda	15 Unit	9.040.000	15 Unit	30.000.000	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	12 Unit	70.750.000	12 Bulan	38.000.000	
2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	1 Unit	14.620.000	12 Bulan	500.000.000	
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	1.355.993.068	1 Paket	344.800.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		CATATAN PENTING
			Lokasi	target	(Rp)	target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		TOTAL USULAN PAGU PELKOP			5.826.270.111		6.000.000.000	
	Tota Rancangan Pagu Dinas dan UPTD				100.134.458.000		97.800.000.000	

BAB V

PENUTUP

Renja Atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 berdasarkan acuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Tema Pembangunan RPD tahun 2025 adalah “Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing”. Penyusunan Renja tahun 2025, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Dinas Perindagkop kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan Renja tahun 2025 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan Renja tahun 2025 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Tahun 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2025 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Renja Tahun 2025 merupakan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku Industri Pelaku KUKM dan Pelaku usaha untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
3. Renja tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025;
4. Setiap Unit Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usahak Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mempedomani RENJA Tahun 2025 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan

terhadap kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renja K/L 2025.

5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renja Dinas Perindagkop & UKM tahun 2025 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD beserta unit- unit dibawahnya dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

5.2 Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT PERANGKAT DAERAH PROV. KALTIM





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1 / K. 305 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Program dan Kegiatan Bidang Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, didasarkan pada rencana yang telah disusun, maka dipandang perlu penunjukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program dan kegiatan Bidang Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44221);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Ketujuh Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan membuat dokumen penyusunan rencana kerja (Renja) Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KETIGA

: Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 April 2024

Pj GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 196905121989032009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR /K. /2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN 2025 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

- Pengarah : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 6. Kepala Unit Pelatihan Teknis Daerah Pelatihan Koperasi Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur]
 7. Ence Adhar Affan, ST (Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
 8. Renny Sumardi, ST (Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)

9. Agus Wardana, ST (Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
10. Yogi Syahrul Junaidi, S. TR. Ip (Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
11. Hera Nuraeni, SE (Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
12. Gusti Musahhada (Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
13. Feiny Deliana S.Pi. (Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
14. Asep Nuzuludin S.T. (Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
15. Rasidi (Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
16. Zuber (Bidang Koperasi dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
17. Rovan Amhar, SE (Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
18. Hambali, SE (Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
19. Huzi Faridla, A.Md (Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
20. Eka Sarjani Bakti S.Sos, M.Si (Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)

Pj GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AKMAL MALIK

Berita Acara

Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Pada hari Senin tanggal empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

A. Pemaparan materi

1. "Major Project Tahun 2024-2026" oleh Ibu Heni Purwaningsih selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim.
2. " Pengendalian Inflasi (Pembentukan Pusat Distribusi Provinsi) " oleh Kadis Perindag Jawa Barat.
3. "Koperasi Modern" oleh Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI.
4. "Pembangunan Rumah Produksi Bersama" oleh Akademisi Universitas Mulawarman.

B. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 4 Maret 2024

J a m : 16.00 WITA

Tempat : Ballroom Hotel Grand Senyiur

Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Kegiatan dan Target Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Mayor Project tahun 2024-2026 (Pusat Distribusi Provinsi, Rumah Produksi Bersama, UKM Digital, Koperasi Modern dan Kawasan Industri) dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan; Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, dan Dinas yang membidangi sektor Indagkop dan UMKM Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur serta Stakeholder terkait.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 04 Maret 2024

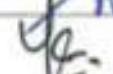
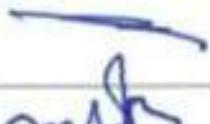
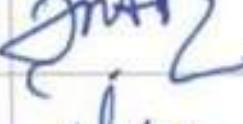
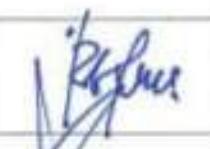
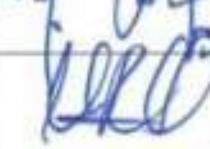
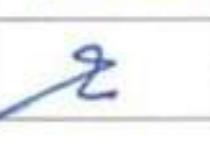
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM

Provinsi Kalimantan Timur,



Heni Purwaningsih, S.Si.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197303141998032009

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

NO	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Friznian	Dinas Koperasi, UMKM & Perindustrian Kota Balikpapan	Kabid Koperasi & UMKM	
2	YUSVINIE F.	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	Kabid Serbagi	
3	KUSNUL K	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab. PPU	KABID. IND	
4	YUSF	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Paser	Kadir	
5	ANWARI PAKATT	Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara	Kabid pemas	
6	Diananto. D.	Dinas Koperasi & UKM Kab. Kutai Kartanegara	Kabid pemas	
7	MERRY EM	Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Kutai Barat	PEMBINA IND	
8		Biro Perekonomian dan Sumber Daya Kab. Mahakam Ulu		
9		Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota Bontang		
10	Teguh ARISTA CNY	Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Kutai Timur	KABID	
11	Teguh P. Santosa	Dinas Koperasi & UKM Kab. Kutai Timur	Kadir	
12	Eva Yunika	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kab. Berau	Kadir	
13	Nurrahman	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Kadir	
14	Marnawaty	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Kadir	



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 500.2/4187/EK

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM PERANGKAT
DAERAH DAN FORUM PERENCANAAN SEKTOR INDUSTRI,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kegiatan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Panitia Pelaksana dan Narasumber dalam melaksanakan Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/12963/3667-III/BPKAD tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Panitia Pelaksana dan Narasumber pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pelaksana dan Narasumber pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.(Uraian tugas terlampir)
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Timur
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TENTANG
KEGIATAN FORUM PERANGKAT
DAERAH DAN FORUM
PERENCANAAN SEKTOR INDUSTRI,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024.

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DAN FORUM PERENCANAAN SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN,
KOPERASI, DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- Anggota : 1. Abdi Rahman, S.Kom. (Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
2. M. Lukman Hakim, S.Kom. (Penyusun Bahan Kerjasama Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
3. Muhamram Al kaufy, S. Pd. (Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
4. Muhammad Zorniansyah,A.Md. (Teknisi Saran dan Prasaran Sub Umum Dinas Perindustrian,

- Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
5. Indra Widodo, S.Pd. (Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
 6. Yogi Syahrul Junaidi, S. TR. Ip (Pengelola Program Dan Laporan Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur)
 7. Nafizah Hayati, S.IP (Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
 8. Isriani, S.E. (Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
 9. Rika Nur Febryna, S.Ak. (Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
 10. Susi Susanti Sitohang, S.Pd. (Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).

Moderator	:	Moderator Profesional.
MC	:	Master of Ceremony Profesional.
Pembaca Do'a	:	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
Notulen	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ririn Octaviani, S.T (Perencana Ahli Muda Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).2. Huzi Faridla, A.Md (Pengelola Program Dan Laporan Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Provinsi Kalimantan Timur).
3. Agung Handoko, S.I.Kom. (Penyusun Bahan Kerjasama Pos dan Informatika Sub Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Februari 2024
Sekretaris Daerah,



**LAMPIRAN II: URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
FORUM PERANGKAT DAERAH DAN
FORUM PERENCANAAN SEKTOR
INDUSTRI, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.**

- Pengarah : 1. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan;
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Ketua : 1. Bertanggung jawab terhadap Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur;
2. Mengkoordinir secara keseluruhan kegiatan dan tugas Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan koordinasi masing-masing panitia pelaksana.
- Wakil Ketua : 1. Mendampingi ketua dalam mengkoordinir seluruh kegiatan;
2. Membantu ketua dalam mengawasi dan melakukan pengendalian seluruh proses kegiatan.
- Sekretaris : 1. Mengkoordinir Surat Masuk dan Keluar serta tindak lanjut persiapan dan pelaksanaan;
2. Membuat konsep sambutan laporan Ketua Panitia;
3. Mempersiapkan dan mengarsipkan surat menyurat Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan;
4. Membuat draft Surat Keputusan Panitia Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan;
5. Melaporkan persiapan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan.
- Anggota : 1. Menyiapkan kelengkapan fasilitas Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan (Sound system, microfon, infokus, layar, pemasangan spanduk, laptop, kamera, dan kelengkapan lainnya);
2. Mendokumentasikan dan mencetak kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan;
3. Membereskan kelengkapan fasilitas Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan;
4. Menyiapkan absensi;

5. Menyiapkan konsumsi;
6. Menyiapkan akomodasi.

- Notulen :
1. Mencatat hal-hal penting dari penyampaian materi oleh narasumber;
 2. Berkoordinasi dengan notulis per bidang pada sektor Indagkop dan UKM;
 3. Menyusun kesimpulan hasil Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan dari catatan notulis pada masing-masing sektor Indagkop dan UKM;
 4. Menyusun dan membuat kesimpulan dan laporan Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan sektor Indagkop dan UKM Prov. Kaltim;
 5. Mencatat pertanyaan peserta Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan tentang permasalahan, isu-isu perkembangannya sektor di bidang beserta kendala dan solusinya;
 6. Menyusun/mencatat usulan program dan kegiatan di bidang dari peserta Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Kab/Kota.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : Februari 2024
Sekretaris Daerah,

